

**ANALISIS RELASI/HUBUNGAN ORGANISASI NON PEMERINTAHAN DALAM
ADVOKASI KEBIJAKAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PEKALONGAN
(Studi Komunitas Peduli Kali Loji (KPKL) dalam Penanganan Limbah Batik dan Sampah
Pada Sungai Kota Pekalongan)**

Suci Rejeki, R. Slamet Santoso, Retna Hanani

Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Profesor Haji Soerdarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024)7465402 Faksimile (024) 7465404

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Pekalongan is an area that has many rivers in the middle of the city. As a city, Pekalongan City still faces problems in the form of waste and garbage pollution. Where Pekalongan is a city of batik and the batik industry is the main supporter of the community's economy. It is known that the government's efforts to overcome these problems have not been able to overcome the problem optimally. For this reason, the existence of the Komunitas Peduli Kali Loji (KPKL) as one of the Non-Governmental Organizations is important. The Komunitas Peduli Kali Loji (KPKL) has an involvement to assist the government in overcoming environmental problems in Pekalongan City, as a result of the very critical condition of the river.

Based on this involvement, the researchers wanted to see how the relationship between KPKL and the Government (City, Regency, Province and Central). So this research was conducted to describe and analyze the relationship between KPKL and the Government in the context of handling the problem of batik waste and garbage in the Pekalongan City River. The approach used is descriptive qualitative with data collection techniques in the form of interviews, field observations, documentation and literature study. The results of the study indicate that the relations/relationships between KPKL and the Government include: First, relations/relationships that involve KPKL in Government activities; Second: the relationship/relationship between KPKL and the Government is cooperative in that this relationship is mutually beneficial, a partnership relationship where this relationship is very participatory in the context of development to conflictive relationships, taking distance so as to limit the space for movement; Third: the relationship/relationship of KPKL as a parallel partner of the Government.

Keywords: KPKL, Relations/Relations, Government

ABSTRAK

Pekalongan merupakan wilayah yang banyak terdapat sungai ditengah kota. Sebagai salah satu kota, maka Kota Pekalongan masih menghadapi masalah berupa pencemaran limbah dan sampah. Dimana Pekalongan merupakan kota batik dan industri batik adalah penyokong utama perekonomian masyarakat. Diketahui bahwa adanya upaya pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut belum mampu mengatasi masalah secara maksimal. Untuk itu adanya Komunitas Peduli Kali Loji (KPKL) sebagai salah satu Organisasi Non Pemerintahan menjadi penting. Komunitas Peduli Kali Loji (KPKL) mempunyai keterlibatan untuk membantu pemerintah dalam mengatasi masalah lingkungan hidup di Kota Pekalongan, sebagai akibat dari kondisi sungai yang sangat kritis.

Berdasarkan keterlibatan tersebut, maka peneliti ingin melihat bagaimana relasi/hubungan antara KPKL dengan Pemerintah (Kota, Kabupaten, Provinsi dan Pusat). Sehingga penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan dan menganalisis relasi/hubungan antara KPKL dengan Pemerintah dalam rangka penanganan masalah limbah batik dan sampah di Sungai Kota Pekalongan. Pendekatan yang digunakan adalah *deskriptif kualitatif* dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi lapangan, dokumentasi dan studi pustaka. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi/hubungan KPKL dengan Pemerintah mencakup: : *Pertama*, relasi/hubungan yang melibatkan KPKL dalam aktivitas Pemerintah; *Kedua*: relasi/hubungan KPKL dengan Pemerintah bersifat *cooperatif* dimana hubungan ini saling menguntungkan, hubungan yang *partnership* dimana hubungan ini sangat partisipatif dalam rangka pembangunan hingga hubungan *conflictif*, mengambil jarak sehingga membatasi ruang gerak; *Ketiga*: relasi/hubungan KPKL sebagai mitra sejajar (*pararell*) Pemerintah.

Kata Kunci: KPKL, Relasi/Hubungan, Pemerintah

A. PENDAHULUAN

Perkembangan sebuah kota tidak akan terlepas dari keberadaan industri, adanya industri di kota tersebut biasanya menimbulkan hubungan yang timbal balik antara pencemaran, kesehatan dan lingkungan hidup. Misalnya pada hubungan timbal balik dalam perkembangan industri batik masyarakat Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Sebagai kota batik, Banyak

masyarakat Pekalongan khususnya di daerah Kota Pekalongan yang menjadi pengusaha batik. Menurut Isnawati (2014), menyatakan bahwa sampai saat ini industri batik di Kota Pekalongan merupakan industri rumahan atau Usaha Kecil Menengah (UKM) (Romadhon, 2017: 50).

Keberadaan industri tersebut sejatinya sangat berguna bagi kesejahteraan masyarakat. Namun, faktanya keberadaan

industri batik di Kota Pekalongan memiliki dampak negatif terhadap kondisi lingkungan hidup, terutama pada daerah aliran sungai (das) Kota Pekalongan. Endapan limbah industri batik tersebut menyebabkan air sungai memiliki bau yang tidak sedap, menjadi berwarna- warni bahkan menjadi hitam pekat. Hal ini terjadi karena banyak pengusaha batik, baik skala kecil dan skala besar membuang hasil limbah produksinya langsung ke sungai – sungai ataupun selokan tanpa pengolahan terlebih dahulu (Mahfudloh, 2015:2).

Selain masalah sungai akibat limbah batik, Kota Pekalongan juga dihadapkan pada masalah sampah. Permasalahan sampah menjadi perhatian utama Pemkot Pekalongan, hal ini berkaitan dengan sebanyak 17,5 Ton sampah dibuang sembarangan dan TPA yang overload sehingga memerlukan pembangunan TPA baru. Menurut Kepala DLH Kota Pekalongan, Ibu Purwanti menyatakan bahwa data sampah penduduk Kota Pekalongan, menghasilkan 146,38 Ton sampah perharinya, namun hanya 88 % sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir (TPA), sehingga dikurangi total sampah yang dihasilkan tersebut berarti 17,5 Ton sampah di Kota Batik belum dapat ditangani. Sampah tersebut dibuang

sembarangan, baik ke sungai, drainase, maupun lahan kosong. Sedangkan untuk kondisi TPA yang overload diketahui bahwa pada Desember 2020, ketinggian sampah mencapai 18 Meter. Overload sampah sebenarnya sudah terjadi sejak 2016, rata – rata dalam sehari terkumpul sebanyak 149 kubik sampah baru. Padahal TPA hanya mampu menampung 80 – 100 kubik sampah.

Berdasarkan masalah tersebut, Pemkot telah melakukan langkah – langkah strategis dalam rangka mengatasi masalah yang ada, misalnya: dalam mengatasi masalah sampah yang dibuang sembarangan, melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Pekalongan Pemerintah Kota melakukan berbagai upaya seperti melakukan sosialisasi. Sosialisasi dilakukan dengan mengadakan FDG sampah dan limbah cair, yaitu bersama dengan tokoh – tokoh masyarakat yaitu: Ulama, Kyai, Ustadz, serta FKUB. FDG tersebut dilaksanakan pada Agustus tahun 2019 bertempat di *Guest House* Walikota Pekalongan. Adapun langkah strategis lainnya, yaitu dengan pengoptimalan peran serta dari Satuan Tugas Sungai Tim Jogo Kali yang telah dibentuk sejak tahun 2019, pemerintah berencana menambah jumlah perahu dan petugas Tim Jogo Kali. Dimana bertambahnya perahu dan petugas akan membantu dalam pelaksanaan upaya

pengawasan secara rutin mulai dari muara pantai hingga ke wilayah Kuripan. Selain itu, Pemerintah juga akan memberikan sanksi bagi yang melanggar sesuai dengan Perda dengan penerbitan Perwal tentang Insentif dan Disinsentif Pengelolaan Sampah.

Contoh lainnya, langkah strategis pemerintah untuk kondisi TPA Degayu yang overload adalah dengan melakukan pembakaran sampah dengan menggunakan alat pembakar khusus. Selain itu, Menurut Kepala Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bapak Teguh Prabowo dalam wawancara peneliti dengan DLH Kota Pekalongan, mengatakan bahwa Pemerintah Kota juga berencana akan membangun TPA Regional dengan bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang memang telah disepakati sejak lama.

Namun, adanya langkah – langkah strategis yang dilakukan pemerintah tersebut belum mampu mengatasi masalah lingkungan hidup secara maksimal. Misalnya pada masalah sampah dimana TPA Degayu mengalami overload. Pemerintah belum mampu mengatasi masalah ini karena adanya kendala lokasi, warga disekitar TPA baru yang diusulkan berusaha melakukan penolakan dan adanya respon yang tidak disambut baik atau tidak seriusnya Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam

rangka mewujudkan kerjasama TPA Regional menyebabkan masalah seperti penolakan di daerah yang akan dijadikan TPA, hal ini terjadi juga karena kondisi sampah di Kabupaten Pekalongan yang masih aman dan belum perlu penanganan karena wilayah yang masih luas menjadikan kerjasama ini belum terlaksana. Namun Pemerintah Kota sampai dengan saat ini terus berupaya untuk berkoordinasi dengan Provinsi Jawa Tengah karena menyangkut dua daerah, dimana harapannya TPA Regional tersebut dapat menjadi jalan keluar untuk mengatasi masalah sampah tersebut.

Berdasarkan fakta – fakta tersebut, maka adanya ketelibatan Komunitas Peduli Kali Loji (KPKL) sebagai salah satu Organisasi Non Pemerintahan yang mampu memainkan peran dalam kebijakan lingkungan hidup di Kota Pekalongan perlu menjadi perhatian. Dimana menurut Pendiri KPKL Ibu Titik Nuraeni, menyatakan bahwa Komunitas Peduli Kali Loji adalah komunitas yang independen dan peduli terhadap pencemaran yang terjadi di Sungai Pekalongan yang sampai saat ini sungai menjadi tempat pembuangan limbah industri, penuh dengan sampah, dan enceng gondok sehingga sungai Kota Pekalongan menjadi kotor, bahkan menjadi hitam pekat dan memiliki bau tidak

sedap (T. Nuraeni, *Personal Communication*. 24 September 2019).

Keterlibatan KPKL dalam upaya mengatasi pencemaran daerah aliran sungai (das) diwujudkan melalui relasi/hubungan sejajar (*pararell*) dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Upaya membangun relasi/hubungan, baik di tingkat Kota, Kabupaten, Provinsi, dan Pusat merupakan bagian dari Program Kerja Jangka Pendek (Tahunan) yang dilakukan KPKL. KPKL juga menjalin kerjasama dengan pemangku kepentingan/*stakeholders* seperti instansi pemerintahan. Adapun beberapa kinerja KPKL dalam upaya membangun relasi/hubungan dalam advokasi kebijakan adalah sebagai berikut.

Tabel 1.2
Kinerja KPKL dalam Membangun Relasi (Memperluas Jaringan) dari Tahun 2014 - 2019

Program	Kinerja KPKL
Membangun relasi (memperluas Jaringan)	<ul style="list-style-type: none"> Aksi rutin bersih sungai (Kali Loji, Brengi, Setu, Bumirejo, dan Kali Baros Pekalongan) yang sudah lebih dari 170 kali dilakukan dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat. Menginisiasi pertemuan penanganan permasalahan sungai di Pekalongan yang melibatkan DLH Kab/Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang, DPU Kab/Kota Pekalongan dan Batang, BPBD Pekalongan, PSDA Pemali Comal dan PPNP.

<ul style="list-style-type: none"> Menyelenggarakan Konferensi Sungai Asia di Pasonna Hotel Pekalongan Tahun 2018. Partisipasi dalam Musrenang dan pertemuan lainnya (seperti FDG dll) yang berkaitan dengan permasalahan sungai dan kegiatan sosial lainnya. Menyelenggarakan Festival Kali Loji dan Gerakan Pungut Sampah sebagai bentuk kampanye penyelamatan lingkungan dan sungai sejak tahun 2015.

Sumber: *Profile KPKL, 2020*

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis akan mengkaji “Bagaimana relasi/hubungan antara KPKL dengan Pemerintah dalam rangka penanganan masalah limbah batik dan sampah di Sungai Kota Pekalongan?”. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk Menggambarkan dan menganalisis relasi/hubungan antara KPKL dengan Pemerintah dalam rangka penanganan masalah limbah batik dan sampah di Sungai Kota Pekalongan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian *deskriptif kualitatif* dimana subjek penelitian adalah Komunitas Peduli Kali Loji dan lokus penelitian berada di Kota Pekalongan. Adapun data penelitian didapatkan melalui *Data Primer* yaitu wawancara dengan subjek (Pendiri KPKL, Pengurus, dan Perwakilan

DLH Kota Pekalongan) dan melalui *Data Sekunder* berupa Artikel, Jurnal dan Laman Media Sosial berupa *Facebook*.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil temuan penelitian dalam relasi/hubungan KPKL dengan Pemerintah (Kota, Kabupaten, Provinsi dan Pusat), relasi/hubungan yang terjalin menghasilkan 3 (tiga) relasi hubungan dimana relasi/hubungan tersebut mencakup: relasi/hubungan yang melibatkan KPKL dalam aktivitas pemerintah, relasi/hubungan *cooperatif, partnership* hingga *confliktif*, dan relasi/hubungan *pararell* sebagai mitra pemerintah. Dimana relasi/hubungan tersebut didasarkan pada teori – teori yang dijabarkan oleh para ahli, seperti John Clark, Abdul Gaffar, maupun Priyono dan Pranaka. Relasi/hubungan yang terjalin ini merupakan hasil dari analisa penulis melalui pencarian *Data Primer* (wawancara) dan melalui *Data Sekunder* (Artikel Ilmiah, Postingan Media Sosial, dll).

A). Relasi/hubungan yang melibatkan KPKL dalam aktivitas pemerintah

Berdasarkan temuan hasil penelitian mengenai relasi/hubungan antara KPKL dengan Pemerintah (Kota, Kabupaten, Provinsi dan Pusat) yang melibatkan KPKL dalam aktivitas Pemerintah. Menurut peneliti, temuan hasil penelitian tersebut

menunjukkan relasi/hubungan yang dapat dijelaskan melalui teori yang dikemukakan oleh John Clark (1996) dalam (Suradi, 2003: 72), dimana hubungan antara LSM dalam hal ini adalah Komunitas Peduli Kali Loji (KPKL) memiliki hubungan yang saling memperbaiki dengan mengembangkan iklim kebijakan yang kondusif seperti melibatkan Komunitas Peduli Kali L oji (KPKL) dalam aktivitas pemerintah, dimana hal tersebut ditandai dengan adanya kolaborasi antara Komunitas Peduli Kali Loji (KPKL) dengan Pemerintah (Kota, Kabupaten, Provinsi dan Pusat).

“LSM memiliki hubungan atau relasi yang saling memperbaiki. Sehingga kedua sektor ini dapat mengembangkan iklim kebijakan yang kondusif melalui dua tipe kebijakan, yaitu melibatkan LSM dalam aktivitas pemerintah dan membentuk kekuatan legal formal dalam upaya pemberdayaan masyarakat” (John Clark (1996) dalam (Suradi, 2003: 72))

Misalnya pada kegiatan KPKL dalam pemetaan titik – titik pompanisasi untuk megurangi banjir rob tahun 2016, dimana pada saat itu KPKL berhasil melakukan audiensi sehingga KPKL bersama dengan Pemerintah Kota dan masyarakat terdampak

bergotong – royong dalam pemetaan pompanisasi rob tersebut. Kemudian pada tahun 2019, KPKL juga dilibatkan dalam undangan sidang 3 Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pemali Comal, dimana kegiatan ini juga ajang untuk menginformasikan permasalahan yang terjadi dan berusaha agar KPKL masuk dalam issue strategisnya (T. Nuraini, *Personal Communication*. 24 September 2020).

Selain kegiatan tersebut, adapula kegiatan KPKL untuk mengikuti FGD yang dilaksanakan oleh DPRD Kota Pekalongan bersama dengan DLH dan dinas lainnya yang terkait. Pembahasan FGD tersebut berkaitan dengan permasalahan sampah yang memerlukan manajemen persampahan yang merangkul semua elemen masyarakat agar sampah dapat menjadi sumber daya baru melalui teknologi.

Beberapa kegiatan diatas menurut Peneliti telah menggambarkan bagaimana relasi/hubungan antara KPKL dengan Pemerintah, dimana hubungan/relasi tersebut menggambarkan bagaimana relasi/hubungan yang dikemukakan oleh John Clark (1996).

B). Relasi/hubungan KPKL dengan Pemerintah yang bersifat *cooperatif* atau *partnership* hingga *conflictif*

Temuan hasil penelitian, menunjukkan relasi/hubungan antara KPKL dengan Pemerintah bersifat *cooperatif*, *partnership* hingga *conflictif*. Berdasarkan temuan tersebut, maka hubungan/relasi antara KPKL dan Pemerintah (Kota, Kabupaten, Provinsi, dan Pusat) dapat dijelaskan melalui teori yang dikemukakan oleh Gaffar (2006) dimana relasi/hubungan tersebut tidak dapat dipisahkan, yang dalam keberjalanannya hubungan/relasi tersebut mempunyai sifat yang *cooperatif* dan *partnership* hingga hubungan *conflictual*.

“Relasi/hubungan antara pemerintah dengan Organisasi Non Pemerintahan atau LSM sama sekali tidak dapat dipisahkan. Ditinjau dari sejarahnya, relasi LSM dan pemerintah mengalami pasang surut, dari hubungan yang bersifat *cooperative* dan *partnership* hingga hubungan yang sifatnya *conflictual*” (Gaffar, 2006).

Misalnya pada Aksi Bersih Sungai di Kali Brengi, KPKL bersama dengan DPU Kota Pekalongan yang diundang oleh PSDA Pemali Comal bersama-sama membersihkan bantaran Kali Brengi yang penuh dengan

enceng gondok, sampah dan beberapa jenis limbah lainnya yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2021, dimana Aksi Bersih Sungai yang dilaksanakan KPKL, telah menghasilkan setidaknya sudah lebih dari 170 kali melaksanakan aksi rutin dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat.

Selain itu, relasi/hubungan yang *cooperatif* dan *partnership* juga diperlihatkan dengan kegiatan Festival Kali Loji pada tahun 2015 dan tahun 2016. Pada tahun 2015 KPKL berhasil melibatkan pemerintah, swasta maupun masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan Festival Kali Loji yang pertama, adapun pihak-pihak yang terlibat yaitu: Kospin Jasa, Suzuki, PLN, Bank Jateng, Kantor Pos, Kepala DPU, Kepala DPPKAD, Batik Global, Melati Berduri, Kepala BLH Kabupaten, Batik Larisa, Gapensi, Maya Food, Bank Pekalongan, BKK Utara, Kopena, Walikota Pekalongan, Lohitek, Dishubparbud, Perhutani, Dindikpora maupun Kemenag. Kemudian pada tahun 2016, KPKL berhasil menyelenggarakan kembali Festival Kali Loji, dimana saat itu permasalahan sungai di Pekalongan sudah mulai mendapatkan perhatian baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota, dengan hadirnya Ibu Menteri Siti Nurbaya dan Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan RI dan jajarannya serta Bapak Walikota beserta jajarannya.

Bersamaan dengan relasi/hubungan yang berlangsung secara *cooperatif* dan *partnership*, pada awal terbentuknya KPKL, Peneliti juga melihat bahwa relasi/hubungan yang muncul juga dihadapkan pada situasi yang kurang mendukung yang akan mengarah pada relasi/hubungan *confictif*. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat yang ditopang oleh industri – industri terutama batik, yang dalam hal ini sumber permasalahan tersebut berasal dari sektor tersebut, terutama para pengusaha.

“Faktornya kesadaran masyarakat masih sangat rendah di Pekalongan. Karena sudah sejak lama dibiarkan kondisi ini mbak, jadi akhirnya berdampak pada pola pikir masyarakat kalau buang sampah dan limbah ke sungai itu tidak masalah. Tidak ada tindakan tegas bagi pelaku usaha yang mencemari, karena mereka memberi uang dan beralasan kalau batik dll itu penopang ekonomi kota mbak... Makanya kegiatan saya yang terkait ini sebetulnya tidak disukai pemerintah dan pengusahanya... tapi kami tetap berbuat dengan cara – cara kami” (T. Nuraini, *Personal Communication*. 24 September 2020).

C). Relasi/hubungan KPKL dengan Pemerintah sebagai mitra sejajar (*pararell*)

Temuan hasil penelitian menunjukkan relasi/hubungan KPKL sebagai mitra sejajar pemerintah. Temuan ini dapat dijabarkan menurut teori yang dikemukakan oleh Priyono (1997), dimana “relasi/hubungan LSM dengan Pemerintah dibedakan atas relasi *assosiatif* (sangat dekat), relasi *pararell* (mitra sejajar) dan relasi *conlictif* (mengambil jarak)” (Priyono (1997) dalam (Suradi, 2003)).

“...pada hubungan *pararell*, LSM sebagai mitra sejajar pemerintah dan bekerjasama dengan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan dan program pembangunan nasional. Dalam pola relasi ini, LSM dengan pemerintah bekerjasama berdasarkan prinsip sebuah tim kerja (*team work*), antara keduanya saling membutuhkan dan saling melengkapi. Dalam hal ini, sumber kegiatan dapat bersumber dari pemerintah, penyandang dana (donator), atau LSM sendiri. Dalam pola relasi ini, LSM dapat mendukung atau mempengaruhi, dan bahkan dapat mengubah kebijakan pemerintah.

Misalnya, dalam relasi/hubungan sebagai mitra sejajar pemerintah KPKL telah menginisiasi penanganan permasalahan sungai di Pekalongan yang telah melibatkan DLH Kab/Kota Pekalongan dan Batang, DPU Kab/Kota Pekalongan dan Batang, BPBD Pekalongan, PSDA Pemali Comal dan PPNP.

Kemudian Pada kegiatan KPKL bulan September 2020, KPKL berpartisipasi dalam undangan diskusi bersama team CDK IV DLHK Provinsi Jawa Tengah berkaitan dengan kondisi Kali Loji yang kondisinya memprihatinkan dan terkait rencana Program Kampung Iklim (Proklim) yang dilakukan bersama dengan daerah-daerah sekitar Kali Loji dengan melibatkan masyarakat bersama KPKL. Adanya kegiatan ini KPKL menjadi pelaksana untuk mensosialisasikan rencana program dengan beberapa kali survey lapangan ke masyarakat secara langsung guna mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di daerah panjang wetan bugisan, sapuro kebulen, dan bendan kergo.

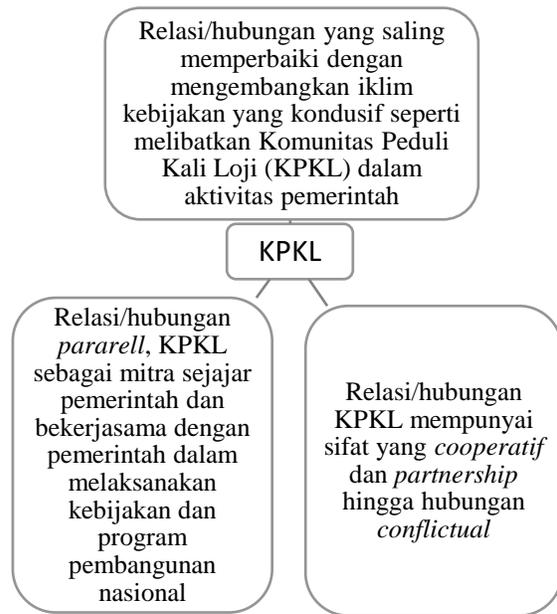
Relasi/hubungan *pararell* antara KPKL dengan pemerintah juga diperlihatkan dalam penyelenggaraan Festival Kali Loji yang pertama, dimana melalui kegiatan ini setidaknya KPKL telah berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp. 36.050.000

untuk penyelenggaraan kegiatan festival baik dari donatur dan sumbangan dari Pemkot berupa snack dan lunch box sebanyak 750 tamu undangan, 2 set sofa dan 2 kendaraan tamu dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bantuan dari Dindikpora menggerakkan siswa SD dan SMP untuk ikut serta dalam Lomba Menggambar, bantuan dari Kemenag juga menggerakkan siswa MI dan MTs untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut.

Kegiatan lainnya, yang dapat memperlihatkan relasi/hubungan *pararell* antara KPKL dengan Pemerintah adalah dengan kegiatan KPKL dalam upaya strategi advokasi untuk permohonan bantuan perbaikan IPAL di Kelurahan Jenggot dan Kauman; pengadaan IPAL komunal di Kelurahan Pringrejo Pekalongan dan peningkatan kapasitasnya. Sehingga pada saat itu dengan inisiatif KPKL tersebut maka direalisasikan pembangunan IPAL Komunal Kapasitas 50-60 home industri batik di Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Pekalongan. Serta inisiatif lainnya yang mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah Kota Pekalongan dalam pembentukan Satgas Sungai Jogo Kali oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan, yang awal mulanya berasal dari salah satu relawan KPKL yang membangun

posko di depan rumah dengan nama Posko Jogo Kali yang digunakan untuk tempat atau titik kumpul warga, guna membahas keadaan sungai dan perkembangan lainnya.

Berdasarkan analisis dari temuan hasil penelitian tersebut, maka peneliti dapat mengidentifikasi relasi/hubungan antara KPKL dengan Pemerintah sebagai berikut.



Gambar 1
Relasi/Hubungan KPKL dengan Pemerintah

D. KESIMPULAN

Relasi/hubungan yang melibatkan KPKL dalam aktivitas Pemerintah: relasi/hubungan antara KPKL dengan Pemerintah (Kota, Kabupaten, Provinsi dan Pusat) merupakan relasi yang saling memperbaiki dengan mengembangkan iklim kebijakan yang kondusif seperti melibatkan Komunitas Peduli Kali Loji (KPKL) dalam aktivitas pemerintah. Misalnya dalam kegiatan FDG,

konsultasi publik, undangan diskusi dan lain sebagainya.

Relasi/hubungan KPKL dengan Pemerintah yang bersifat *cooperatif* atau *partnership* hingga *conflictif*: KPKL berhasil melibatkan pemerintah, swasta maupun masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan KPKL misalnya pada kegiatan Aksi Bersih Sungai, Festival Kali Loji dan lain sebagainya serta relasi/hubungan yang muncul juga dihadapkan pada situasi yang kurang mendukung yang akan mengarah pada relasi/hubungan *confictif* (mengambil jarak).

Relasi/hubungan KPKL sebagai mitra sejajar (*pararell*) Pemerintah: KPKL sebagai mitra sejajar pemerintah dan bekerjasama dengan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan dan program pembangunan nasional. Hubungan yang sejajar (*pararell*) antara KPKL dengan Pemerintah ditandai dengan dana kegiatan yang ada dapat bersumber dari pemerintah, penyandang dana (donator), atau LSM itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Mahfudloh, L. (2015). Strategi Penanganan Limbah Industri Batik Di Kota Pekalongan.
File:///C:/Users/User/Downloads/1136-3945-1-PB.Pdf.
- Romadhon, Y. A. (2017). *Kebijakan Pengelolaan Air Limbah Dalam Penanganan Limbah Batik Di Kota Pekalongan.* (9), 50.
- Suradi. (2003). KOLABORASI LSM DENGAN PEMERINTAH: Kajian tentang Pengembangan Kolaborasi LSM dengan Pemerintah dalam Pembangunan Masyarakat. *Informasi Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 8(3), 69–80.